

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Secara umum, Implementasi adalah suatu bentuk penerapan atau realisasi. Implementasi adalah sebuah urutan langkah untuk mewujudkan gagasan, konsep, kebijakan, atau inovasi menjadi tindakan nyata yang menghasilkan dampak positif dalam bentuk transformasi pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai dan sikap. (Bouman, 2021)

Sementara itu, kebijakan dan program merupakan dua hal yang saling berkaitan. Program merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai sasaran tertentu. Program menjadi instrumen pelaksana dari sebuah kebijakan agar dapat diimplementasikan di lapangan. Salah satu bentuk implementasi kebijakan di bidang kesehatan yang menjadi fokus nasional adalah kebijakan pencegahan dan penanganan stunting.(Ii, 2020)

Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius, terutama pada anak usia balita. Yaitu masalah gizi kronis yang berdampak serius pada pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. Pertumbuhan yang tidak wajar ini disebabkan karena tidak terpenuhinya gizi seimbang pada anak balita ketika masih dalam kandungan dan sejak dilahirkan. Oleh karena itu, upaya penanganan stunting harus dilakukan secara terintegrasi melalui kebijakan yang komprehensif dan melibatkan berbagai sektor. (Kardinal, 2024)

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe mengimplementasikan penanganan dan pencegahan stunting yang tertuang dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 32 Tahun 2021 mengenai Pencegahan

dan Penanganan Stunting secara Terintegrasi di Kota Lhokseumawe. Peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota ini memiliki tujuan utama sebagai berikut: (a) meningkatkan kesadaran semua pihak yang terlibat dan masyarakat tentang kontribusi mereka dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting yang terkoordinasi (b) berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Kota dalam melaksanakan intervensi yang komprehensif untuk pencegahan dan penanganan stunting, serta (c) menentukan prioritas dalam menangani isu stunting dan hal-hal lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, berbagai program telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas, di antaranya Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil, edukasi dan sosialisasi kepada calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta pemberdayaan masyarakat melalui gerakan seperti Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang menekankan kebiasaan hidup bersih dan sehat, seperti stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan sampah dan air limbah rumah tangga. Selain itu, inovasi lokal seperti Program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) dan pembentukan Rumoh Gizi Gampong (RGG) menjadi pusat edukasi dan pelayanan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita yang diinisiasi oleh pemerintah kota bekerja sama dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait. (Pemko Lhokseumawe, 2024)

Menurut data Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2024, angka stunting menunjukkan penurunan signifikan dari 28,7% menjadi 20,1%, menjadikannya sebagai daerah dengan angka stunting terendah kedua di Provinsi Aceh. Penurunan ini mencerminkan adanya dampak positif dari implementasi kebijakan

Walikota tersebut, meskipun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya.

(Pemko Lhokseumawe, 2024)

No	Nama Puskesmas	Jumlah Stunting
1	Banda Sakti	126
2	Muara Satu	120
3	Muara Dua	101
4	Blang Mangat	76

**Tabel 1.1 Data Stunting Di Puskesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

Sumber: Dinas Kesehatan Lhokseumawe

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa kasus stunting di beberapa Puskesmas di Kota Lhokseumawe masih memerlukan perhatian serius. Puskesmas Banda Sakti mencatat jumlah kasus tertinggi, diikuti oleh Muara Satu dan Muara Dua. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan implementasi kebijakan melalui koordinasi lintas sektor agar program yang dirancang dalam Peraturan Walikota dapat berjalan secara efektif dan merata di seluruh wilayah.

**Tabel 1.2 Data Stunting Di Puskesmas Muara Dua Tahun 2024-2025**

No	Nama Desa/ Kelurahan	Stunting	
		Desember 2024	April 2025
1	Paloh Bate	1	2
2	Lhok Mon Puteh	25	21
3	Uteun Kot	11	8
4	Blang Pahroh	13	8
5	Paya Punteut	8	12
6	Keude Cunda	16	15
7	Mns Mesjid	9	9
8	Panggoi	5	8
9	Paya Bili	5	5
10	Mns Alue	5	4
Jumlah		98	92

Sumber: Puskesmas Muara Dua

Berdasarkan informasi mengenai stunting yang dicatat antara Desember 2024 hingga April 2025 di berbagai desa/kelurahan di Kecamatan Muara Dua, tampak adanya kecenderungan penurunan jumlah stunting secara keseluruhan. Pada bulan Desember 2024, total kasus stunting mencatat 98 anak, sementara pada bulan April 2025 turun menjadi 92 anak.

Secara spesifik, beberapa desa menunjukkan penurunan yang signifikan, seperti Lhok Mon Puteh yang menurun dari 25 menjadi 21 anak, Uteun Kot dari 11 menjadi 8 anak, dan Blang Pahroh dari 13 menjadi 8 anak. Desa Keude Cunda juga mengalami penurunan kecil, yaitu dari 16 ke 15 anak. Namun, ada beberapa desa yang tetap menunjukkan angka stunting yang stabil ataupun sedikit meningkat. Seperti Paya Punteut naik dari 8 menjadi 12 anak, dan Panggoi meningkat dari 5 menjadi 8 anak. Sementara desa Mns Mesjid, Paya Bili, dan Mns Alue menunjukkan angka stunting yang tetap stabil dengan variasi kecil.

Penurunan jumlah kasus stunting ini merupakan sinyal positif bahwa upaya untuk menangani dan mencegah stunting telah memberikan hasil. Akan tetapi, kenaikan angka di beberapa desa mengingatkan akan pentingnya perhatian khusus serta pendekatan yang lebih efektif dalam program intervensi agar target penurunan stunting dapat tercapai secara merata di seluruh area. Data ini sangat berharga sebagai gambaran yang nyata mengenai penyebaran kasus stunting yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak, terutama bagi tenaga kesehatan dan para pengambil keputusan di level pelayanan dasar.

Puskesmas Muara Dua secara aktif telah mengimplementasikan program yang mencakup Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Pemantauan Tumbuh Kembang Anak, pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, melakukan

kunjungan rumah untuk pemberian Makanan Pendamping Asi (MPASI) serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada ibu menyusui. Melalui program-program tersebut, Puskesmas ini telah berkontribusi pada pengurangan angka stunting meskipun fluktuasi masih tetap terlihat, sejalan dengan tekad kota Lhokseumawe dalam menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Namun, program penanganan dan pencegahan stunting di Puskesmas Muara Dua belum berjalan maksimal karena masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam memahami tujuan dan pentingnya program pencegahan stunting, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program sehingga beberapa kegiatan mengalami kendala. Hal ini tentu menghambat efektivitas program pencegahan yang dilakukan oleh Puskesmas.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam tentang “**Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 32 Tahun 2021 Mengenai Pencegahan Dan Penanganan Stunting Secara Terintegrasi Di Puskesmas Muara Dua**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut adalah rumusan masalah yang dapat dikembangkan:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 32 Tahun 2021 Mengenai Pencegahan Dan Penanganan Stunting Secara Terintegrasi Di Puskesmas Muara Dua?

2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan program kebijakan tersebut?

### **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 32 Tahun 2021 Mengenai Pencegahan Dan Penanganan Stunting Secara Terintegrasi Di Puskesmas Muara Dua.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program kebijakan tersebut.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 32 Tahun 2021 Mengenai Pencegahan Dan Penanganan Stunting Secara Terintegrasi Di Puskesmas Muara Dua.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 32 Tahun 2021 Mengenai Pencegahan Dan Penanganan Stunting Secara Terintegrasi Di Puskesmas Muara Dua.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis sangat berharap akan dapat memberikan berbagai manfaat:

1) Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah di dapat dalam bangku perkuliahan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program penanganan dan pencegahan stunting di Puskesmas Muara Dua, Kota Lhokseumawe.
- c. Menambah literatur serta bahan informasi ilmiah yang bisa digunakan untuk kajian penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik, di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- b. Bagi masyarakat dan para pembaca agar bisa memberikan masukan serta informasi mengenai implementasi program penanganan dan pencegahan stunting di Puskesmas Muara Dua, Kota Lhokseumawe.
- c. Bagi Puskesmas Muara Dua Kota Lhokseumawe dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program penanganan dan pencegahan stunting serta membantu Puskesmas dalam mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi.